

BRIN Prediksi Awal Ramadhan 3 April 2022, Beda dari Muhammadiyah

JAKARTA (IM) - Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN memprediksi 1 Ramadhan 1443 Hijriah jatuh pada 3 April 2022. Prediksi ini berbeda dari Muhammadiyah yang mengumumkannya awal Ramadhan kemungkinan jatuh pada 2 April 2022.

Profesor riset bidang Astronomi dan Astrofisika, Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaluddin menyampaikan, ketinggian hilal pada 1 April 2022 hanya sedikit di atas 2 derajat. "Hilal tidak mungkin terlihat di wilayah Indonesia pada 1 April mendatang," kata Thomas, dikutip dari situs resmi Lapan.

"Artinya, jika hilal tidak terlihat pada 1 April, maka jumlah hari pada bulan Sya'ban tahun ini akan digenapkan menjadi 30 hari," kata Thomas menambahkan.

Ia menyoroti bahwa penentuan awal Ramadhan, sejak 2022, telah menggunakan kriteria baru, yaitu MABIMS sebagaimana yang juga digunakan Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

"Sejak awal 2022 Kemen-

terian Agama mengadopsi Kriteria Baru MABIMS, yaitu tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Dengan kriteria baru tersebut, posisi bulan di wilayah Indonesia dan negara-negara Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura (negara-negara MABIMS) belum memenuhi kriteria," ungkap Thomas.

Namun, Thomas menganjurkan agar warga menunggu keputusan resmi pemerintah melalui sidang isbat yang akan digelar pada 1 April 2022.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1443 Hijriah akan jatuh pada 2 April 2022 dalam Maklumat Nomor 01/MLM/LO/E/2022 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1443 H.

"1 Ramadhan 1443 H jatuh pada Sabtu Pon, 2 April 2022 M," tulis maklumat tersebut. Masih dalam maklumat yang sama, disebutkan bahwa Ramadhan 2022 berumur 30 hari dan 1 Syawal 1443 H atau Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada 2 Mei 2022. ● mei

April, Kejagung Tentukan Tersangka Pelanggaran HAM Berat di Paniai

JAKARTA (IM) - Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa 61 saksi terkait dugaan terjadi pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua.

"Berdasarkan hasil ekpose yang telah dilakukan pada minggu ini, Kejaksaan Agung akan segera menentukan tersangka pada awal April 2022," tutur Ketut dalam keterangannya, Jumat (25/3).

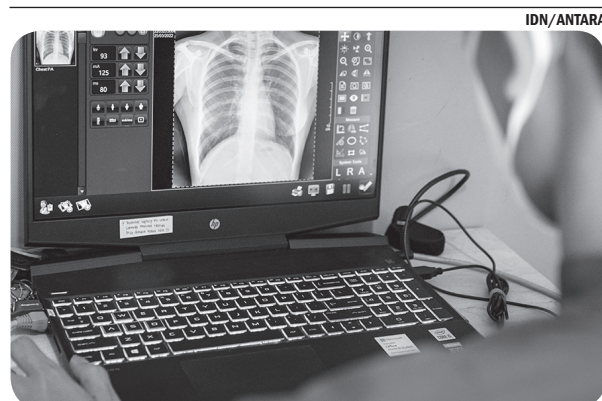
"Ahl yang mengambil visum korban dari RSUD Paniai, ahli balistik pengujian senjata api, ahli hukum humaniter, ahli HAM yang berat, ahli legal forensik, dan ahli hukum militer," katanya.

Kemudian 55 saksi lainnya terdiri dari 8 orang yang berasal dari unsur masyarakat sipil, 24 orang dari unsur TNI, 17 orang dari unsur Polri, serta 6 orang dari tim investigasi yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Pol-

hukum). Berdasarkan penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Selain peristiwa Paniai, terdapat peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Kerusuhan Mei 1998, Wasiar dan Wamena, penghilangan paksa tahun 1997/1998.

Kemudian peristiwa penembakan misterius atau dikenal dengan istilah petrus yang terjadi periode 1982-1985, Simpang KKA Aceh, Jambu Keupok Aceh, pembunuhan dukun santet di Jawa Barat dan Jawa Timur 1998, dan peristiwa Rumah Geudong tahun 1989 di Aceh.

Pengungkapan kasus di Paniai merupakan janji Presiden Joko Widodo. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2014 akibat bentrokan antara warga dengan anggota TNI-Polri. Insiden itu memakan 4 korban jiwa dan 21 lainnya luka-luka. ● han



IDN/ANTARA

PENCEGAHAN PENYAKIT TUBERKULOSIS DI LAPAS
Petugas kesehatan memindai warga binaan di dalam mobil pemindaian sinar X (X-Ray) saat pemeriksaan Tuberkulosis (TB) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II-A Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/3). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Ditjen Pemasyarakatan bersama Kementerian Kesehatan melaksanakan tes pemeriksaan Tuberkulosis terhadap 250 warga binaan lapas tersebut sebagai upaya penanggulangan serta pencegahan penyakit TB yang rentan menular di dalam lapas, sekaligus dalam rangka memperingati hari TB sedunia.

DPR Sebut E-Voting Baru Bisa Diterapkan Setelah Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mendukung usulan pemungutan suara pada pemilihan umum (pemilu) dengan menggunakan metode pemilihan elektronik atau e-voting.

"Ya memang mau enggak mau memang ada satu hari harus ke sana arahnya," kata Muhaimin ditemui kepada wartawan di Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/3).

Namun menurut Cak Imin - panggilan Muhaimin Iskandar -- metode tersebut belum bisa diterapkan pada Pemilu 2024. Soalnya masih banyak yang harus dilakukan pemerintah maupun penyelenggara pemilu untuk mengakomodasi e-voting.

Ia pun mengungkapkan ada tiga hal untuk mempersiapkan e-voting di Indonesia. Pertama, soal kepercayaan atau trusted semua pihak pada teknologi digital. Ia mengatakan, teknologi digital tersebut harus terhindar dari manipulasi.

Menurutnya, e-voting per-

lu terhindar dari kebocoran data seperti yang marak terjadi di Indonesia.

"Bahayanya di situ. Karena ini trusted itu penting. Kalau teknologinya masih cecak-cecak ya bahaya," katanya.

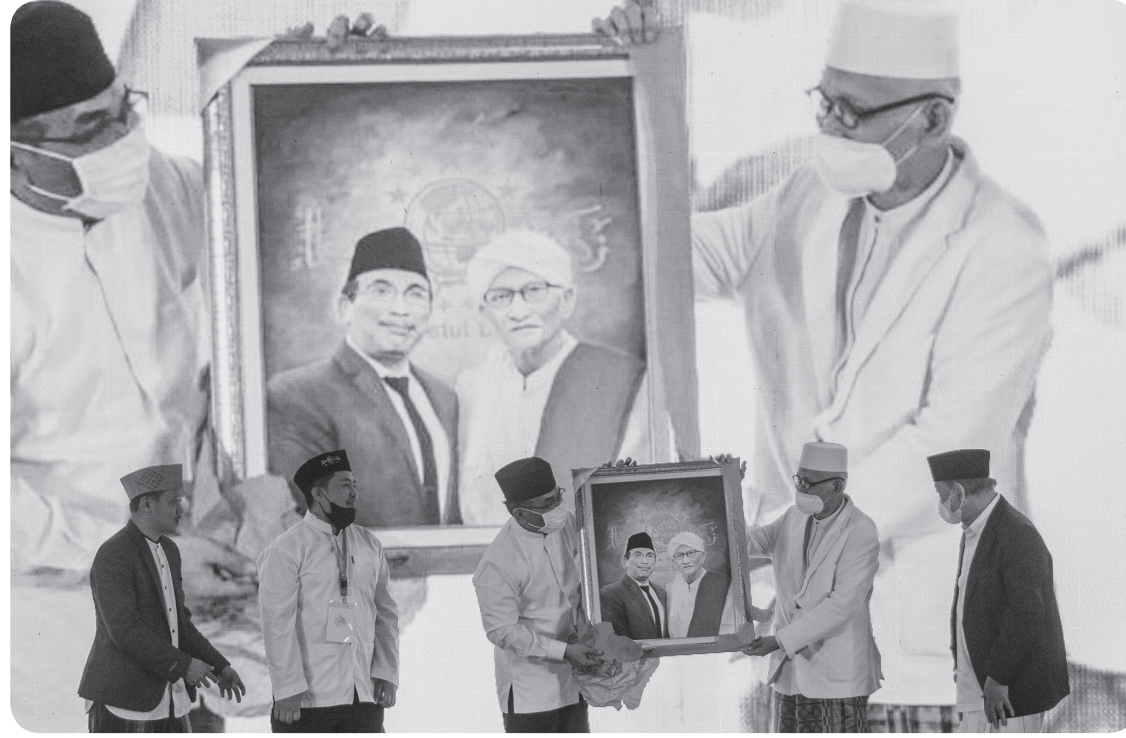
Kedua, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital dinilai perlu ditingkatkan sebelum penerapan e-voting. Kemudian, yang ketiga paling penting menurut Cak Imin adalah pengawasan terhadap jalannya pemungutan suara melalui e-voting. Ia meminta tetap ada pihak pengawas meski nantinya e-voting diterapkan.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengusulkan agar pemungutan suara dalam Pemilu tahun 2024 menerapkan sistem voting elektronik atau e-voting.

Menurut Johnny, sistem pemungutan suara Pemilu dengan e-voting sudah banyak dilakukan di beberapa negara. Kata Johnny dalam keterangan tertulis, Selasa (22/3) lalu. ● han

2 | Polhukum

ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI/



RAKERNAS DAN PENGUKUHAN PBNU
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (tengah) memberikan lukisan kepada sesepuh Ponpes Cipasung KH Ubaidillah Ruhiat (kedua kanan) dan Pimpinan Ponpes Cipasung KH Abun Bunyamin Ruhiat pada Rakernas dan Pengukuhan Pengurus Lembaga atau Badan khusus PBNU Masa Khidmat 2022-2027 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (24/3) malam. Rakernas PBNU yang berlangsung sampai, Jumat (25/3) itu merupakan amanat dari Anggaran Dasar NU Bab XXIII Pasal 89 tentang Rapat-Rapat

Kejagung akan Naikkan Kasus Korupsi Fasilitas Ekspor Minyak Goreng ke Penyidikan

Sejumlah perusahaan yang diberikan fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022 diduga menyalahgunakan dan tidak melaksanakan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) segera menaikkan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam fasilitas ekspor minyak goreng ke tahap penyidikan. Seperti diketahui, saat Indonesia sedang mengalami kelangkaan minyak goreng.

Kapuspemkum Kejagung RI, Ketut Sumedana menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah terjadi kelangkaan minyak goreng. Hal itu terjadi

setelah pemerintah melakukan pembatasan CPO (crude palm oil) dengan menerbitkan sejumlah aturan.

Status penyidikan dinaikkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print: 13/E/2/Fd.1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022.

"Pemerintah melakukan pembatasan ekspor CPO dan turunannya dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 129 Tahun

2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan dalam Negeri (DMO) dan harga penjualan dalam Negeri (DPO)," ujar Ketut Jumat (25/3).

Dia mengatakan, atas regulasi tersebut, eksportir CPO dan turunannya untuk mendapatkan persetujuan ekspor sebelumnya harus melakukan kewajiban distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO) dengan melampirkan bukti kontrak dengan distributor, purchase order, delivery order (DO) dan faktur pajak.

Tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan ketika hendak menunjuk beberapa perusahaan ketika diberikan fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022. Sebagaimana

Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2022 tanggal 04 Maret 2022.

"Namun dalam praktiknya diduga terdapat beberapa perusahaan yang diberikan fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022, menyalahgunakan dan tidak melaksanakan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan," terangnya.

Di mana terjadi penyalahgunaan antara lain besaran jumlah yang difasilitasi kebutuhan dalam negeri (DMO) sebesar 20% menjadi 30%.

"Atas perbuatan tersebut, berpotensi menimbulkan kerugian Negara dan perekonomian Negara, dan Tim Penyidik akan segera menentukan sikap untuk ditingkatkan ke proses penyidikan pada awal bulan April 2022," tuturnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap menerima 'bisikan' adanya permainan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng beberapa waktu ini.

Seiring dengan itu, Kejagung juga tengah mengusut

dugaan indikasi korupsi penyebab langkanya minyak goreng.

"Kami sudah menangkap informasi itu (ekspor). Kami juga sudah proses analisa informasi dan kita mencoba melakukan penyelidikan," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Supardi.

Menurut Supardi, tim masih menelusuri dugaan tindak pidana dalam perkara ekspor CPO yang sejatinya dapat menyebabkan kerugian negara atau pun kerugian perekonomian negara.

"Apakah kerugian negara atau kerugian perekonomian negara, tergantung dari penyelidikan yang kita lakukan nanti," jelasnya.

Rencananya dalam waktu dekat tim akan menjadwalkan klarifikasi dari berbagai pihak seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, juga Bea Cukai pada Kementerian Keuangan terkait ekspor CPO.

"Kasus ini banyak kaitannya. Makanya tidak gampang untuk merunut perkara ini," tutup Supardi. ● han

Taliban Langgar Janji, Ketum PBNU Serukan Hak Perempuan Mendapatkan Pendidikan

TASIKMALAYA (IM) - Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyerukan pemerintahan Taliban di Afghanistan agar memberikan hak-hak layak bagi perempuan.

Seruan Gus Yahya untuk menanggapi keputusan pemerintah Taliban yang melarang perempuan untuk melanjutkan pendidikan selepas sekolah dasar.

Berbicara saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PBNU di Aula Institut Agama Islam Cipasung (IAIC), Cipakat, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (24/3) malam, Gus Yahya mengatakan dia menerima kabar bahwa Afghanistan telah mengeluarkan murid perempuan dari sekolah mereka. Bahkan bagi mereka yang di atas usia 12 tahun dipulangkan dan tidak diperbolehkan sekolah dalam waktu yang tidak ditentukan.

Menurut Gus Yahya, keputusan pemerintah Taliban yang memaksa anak-anak perempuan untuk tidak bersekolah adalah sebuah keputusan yang tidak berpihak pada perempuan dan pendidikan.

"Apakah mereka ingin mengembangkan sistem pendidikan untuk perempuannya? Kita tidak tahu. Tetapi kita ingin menyerukan kepada Afghanistan: lihatlah keuntungan (dan) berkah besar yang telah dilakukan NU dengan memberikan hak pendidikan yang setara untuk perempuan," kata Gus Yahya dikutip dalam laman resmi NU Online, Jumat (25/3).

Ia menyontohkan kepengurusan PBNU yang saat ini dapat melakukan banyak hal karena sejak awal memberikan hak yang sama kepada perempuan yakni adanya Khofifah Indar Parawansa dan Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid di jajaran ketua PBNU.

Gus Yahya menyebut keduanya adalah tokoh perempuan unggul yang dibutuhkan PBNU untuk mengerjakan tugas-tugas keorganisasian.

"Hari ini kita mampu melakukan lebih banyak hal karena kita punya perempuan yang unggul," kata Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah ini.

Mantan jubi presiden Gus Dur ini, menyerukan Afghanistan agar memberikan

pendidikan yang terbaik untuk perempuan Afghanistan.

"Please give your daughters the best education you can provide because they all the ones who will determine the picture of your next generation. (Tolong beri putrimu pendidikan terbaik yang bisa kamu berikan, karena merekalah yang akan menentukan gambaran generasi selanjutnya)," ujar Gus Yahya.

Diberitakan sebelumnya, Afghanistan memutuskan untuk tidak membuka lembaga-lembaga pendidikan bagi anak perempuan di atas kelas enam.

Keputusan untuk hanya membolehkan perempuan bersekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) ini diumumkan seorang pejabat Taliban, Rabu (23/3). Pengumuman bertepatan hari pertama tahun ajaran baru di negara itu.

"Kepemimpinan belum memutuskan kapan atau bagaimana mereka akan mengizinkan anak perempuan kembali ke sekolah," kata Waheedullah Hashmi, seorang komandan senior Taliban. ● han



IDN/ANTARA

KARYA BAKTI TNI BERSIHKAN MASJID JELANG RAMADAN
Anggota TNI memotong rumput di halaman masjid Al Markaz Al Islam di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (25/3). Karya bakti TNI bersihkan masjid yang dilaksanakan jajaran Kodam XIV Hasanuddin tersebut dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1443 H.

PPATK Telah Bekukan Investasi Bodong Rp500 Miliar Lebih dari 275 Rekening

JAKARTA (IM) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali membekukan rekening yang diduga terkait aliran dana investor di produk investasi ilegal atau bodong.

Kepala PPATK, Ivan Yustivandana, pada 24 Maret 2022 lalu menyebutkan, pihaknya kembali membekukan sejumlah rekening yang diduga berasal dari tindak pidana investasi ilegal.

"Ada 17 rekening dengan nilai Rp 77,945 miliar kita bekukan, sehingga total penghentian sementara transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana berupa investasi ilegal sebesar Rp 502,88 M dari 275 rekening," ujar Ivan Yustivandana, Jumat (25/3/2022).

PPATK terus memantau dan melakukan analisis terhadap dugaan tindak pidana investasi ilegal. Dari hasil analisis PPATK, modus aliran uang tersebut cukup beragam.

"Misalkan disimpan dalam bentuk aset kripto, penggunaan rekening milik orang lain dan kemudian dipindahkan ke berbagai rekening di beberapa bank untuk mempersulit penelusuran transaksi," ungkap Ivan Yustivandana.

PPATK dikatakan Ivan terus melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia berkoordinasi dengan FIU dari negara lain.

"Kami memiliki memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait dengan investasi yang diduga ilegal," jelas Ivan Yustivandana.

Ia menekankan pelaporan yang disampaikan oleh pihak pelapor (Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa) ke PPATK juga dimak-

sudkan untuk menjaga Pihak Pelapor dari risiko hukum dan reputasi agar mencegah dijadikan sarana dan sasaran oleh pelaku kejahatan untuk mencuci hasil tindak pidana.

Pihak Pelapor dan Profesi terdiri atas Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa. Penyedia jasa keuangan mencakup bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, dan penyedia jasa keuangan lainnya.

Sementara itu, penyedia barang dan jasa terdiri atas perusahaan/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang perantara dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, dan balai lelang.

"Dalam Pasal 29 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan secara tegas bahwa Pihak Pelapor tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK," tutur Ivan Yustivandana.

PPATK terus berkomitmen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) maupun pencegahan dan pemberantasan TPPU dari hasil kejahatan lingkungan atau Green Financial Crime (GFC). ● han

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. ILTHABI AEROSPACE GROUP di Jakarta Selatan tgl 14-3-2022 (Empat belas Maret Duaribu dua puluh dua) telah dilakukan Penurunan Modal disetor dari Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) menjadi Rp.7.634.000.000,- (Tujuh Milyard enam ratus tiga puluh empat juta rupiah). Segala keberatan/sanggahan dapat diajukan kepada Perseroan.